

Budget Tracking Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting*: Analisis Multisektoral di Kabupaten Tuban

Yuni Setyaningsih

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Email: yuni.setya@its.ac.id

Received: 01/07/2025.

Reviewed: 16/07/2025.

Published: 31/07/2025.

Copyright ©2025 by the author (et al) and Jurnal Sosial Humaniora (JSH)

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Subject Area: Development Studies

Abstract

Stunting remains an alarming problem in Indonesia, with profound implications for human capital development and long-term economic productivity. Despite the national government's commitment, including Presidential Regulation No. 72/2021, inefficiencies in local budget execution continue to challenge targeted outcomes. This study aimed to track stunting-related budgets in Tuban Regency between 2021 and 2022, with a focus on allocation trends, sectoral involvement, and realization performance across specific and sensitive interventions. Budget allocations for stunting reduction increased sharply from IDR 17.5 billion in 2021 to IDR 51.1 billion in 2022 (a 192% increase), with participating government offices expanding from 4 to 9. The Health Department remained the lead implementer, implementing IDR 17.6 billion in 2022, or 34.5% of the total stunting-related budget with community nutrition services absorbed most of the budget. Meanwhile, the public works spent IDR 10.6 billion for rural water infrastructure, reinforcing the importance of WASH in sensitive interventions. The education sector experienced a threefold increase, yet its share remained under 0.5% of the total. While the environmental sector emphasized infrastructure-based waste management. These findings highlight fiscal expansion yet persistent implementation gaps. It is essential to strengthen budget tagging, intersectoral collaboration, and evidence-based planning to optimize the impact of increased investments in stunting reduction.

Keywords: *stunting reduction effort; budget tracking; specific intervention; sensitive intervention; public financial management*

Pendahuluan

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usia, sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan pascalahir, dan umumnya baru teridentifikasi secara klinis setelah anak berusia dua tahun (Pusdatin Kemenkes RI, 2022). Lebih dari sekadar masalah fisik, *stunting* berdampak jangka panjang yang serius hingga usia dewasa, termasuk penurunan fungsi kognitif dan pertumbuhan fisik, peningkatan risiko penyakit metabolik, serta rendahnya produktivitas kerja, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara di masa mendatang (Astuti, *et.al.*, 2025; Pusdatin Kemenkes RI, 2022; Reinhardt & Fanzo, 2014).

Periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) dimulai sejak masa konsepsi hingga anak berusia dua tahun yang merupakan fase kritis dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak (Hijrawati *et.al.*, 2021). Dalam periode ini, intervensi gizi dan kesehatan yang memadai dapat mencegah gangguan pertumbuhan. Oleh

karena itu, strategi percepatan penurunan *stunting* memerlukan pendekatan yang holistik dan multisektoral, yang mencakup intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan dan suplementasi gizi, serta intervensi sensitif, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi layak, layanan kesehatan dasar, dan edukasi kepada orang tua (Cameron, *et.al.*, 2021; Nurjazuli, *et.al.*, 2023). Pemerataan akses terhadap intervensi ini bergantung pada kapasitas tata kelola publik yang efektif dan tanggap. Peran pemerintah tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penjamin kualitas layanan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang tinggi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yakni menurunkan prevalensi *stunting* menjadi 14% pada akhir tahun 2024 dari 30,8% pada tahun 2018. Komitmen ini diperkuat melalui berbagai kebijakan, termasuk Rencana Aksi Nasional Gizi dan Gizi (RAN PG) 2021-2024, serta partisipasi aktif dalam gerakan global *Scaling Up Nutrition (SUN)*. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 secara eksplisit menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan intervensi gizi yang konvergen, integratif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor dari tingkat pusat hingga desa. Sebagai konsekuensinya, alokasi anggaran dalam program ketahanan pangan dan gizi mengalami peningkatan.

Dalam implementasinya, berbagai sumber daya telah diarahkan untuk mendukung kebijakan ini, termasuk alokasi anggaran yang signifikan dalam program ketahanan pangan dan gizi (Havez, 2020). Namun, efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran tersebut menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan secara lebih mendalam. Pelacakan anggaran dalam konteks ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen strategis yang memungkinkan pengambil kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat, mengidentifikasi kesenjangan, serta mengevaluasi dampak kebijakan secara keberlanjutan (Havez, 2020). Sayangnya, efektivitas pelacakan dan pemanfaatan anggaran untuk program *stunting* masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kelembagaan maupun teknis.

Beberapa hambatan utama dalam pelacakan anggaran *stunting* mencakup kompleksitas aliran dana dari berbagai tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa), yang menjadi tantangan dalam pemetaan pengeluaran secara komprehensif (UNICEF, 2024). Di sisi lain, sistem manajemen keuangan publik yang masih terfragmentasi berdasarkan sektor atau instansi, menghambat koordinasi lintas sektor yang dibutuhkan dalam penanganan isu multisektoral seperti *stunting* (UNICEF, 2024). Selain itu, inkonsistensi nomenklatur program antar lembaga, terbatasnya data yang tersedia, serta kendala dalam praktik *tagging* anggaran masih menjadi tantangan.

Meskipun banyak studi telah dilakukan untuk mengeksplorasi faktor penyebab *stunting*, sebagian besar masih berfokus pada aspek keluarga atau individu, seperti pola asuh, asupan makanan, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Namun, belum banyak kajian yang menelaah secara komprehensif bagaimana anggaran publik berdampak terhadap hasil program *stunting*, terutama dari sudut pandang pengelolaan keuangan publik dan tata kelola kebijakan lintas sektor. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana anggaran dialokasikan, dibelanjakan, serta dikaitkan dengan *output* dan *outcome* program sangat penting untuk

memastikan kebijakan berjalan sesuai sasaran dan mampu menghasilkan dampak yang nyata di lapangan (Fracassi, *et.al.*, 2020).

Dalam penelitian ini, Kabupaten Tuban menjadi wilayah yang dipilih sebagai lokasi studi karena relevansi dan kompleksitas konteksnya. Berdasarkan data prevalensi, kasus *stunting* di Tuban mencapai 30,8% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018), menurun menjadi 25,1% pada tahun 2021 (SSGI, 2021), dan sedikit turun lagi menjadi 24,9% pada tahun 2022 (SSGI, 2022). Angka prevalensi pada tahun 2022 tersebut masih di atas prevalensi Jawa Timur sebesar 19,2% maupun nasional sebesar 21,6%. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Tuban berada di peringkat 8 tertinggi prevalensi balita *stunting* di provinsi Jawa Timur. Meskipun terdapat tren penurunan, pencapaiannya masih terbilang lambat dibandingkan dengan target nasional, yang mengindikasikan adanya potensi permasalahan dalam pemanfaatan anggaran maupun pelaksanaan intervensi. Selain itu, Tuban memiliki komposisi wilayah beragam yang meliputi daerah pesisir, pedesaan, dan kawasan industri yang mencerminkan heterogenitas geografis dan sosial, serta menuntut pendekatan program yang kontekstual dan adaptif. Di sisi lain, dukungan fiskal yang tersedia menjadikannya studi kasus yang representatif untuk menganalisis pelacakan anggaran lintas sektor di tingkat lokal. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi terhadap literatur akademik, tetapi juga dapat mendukung pembuat kebijakan dalam merancang sistem penganggaran yang lebih responsif, transparan, dan berbasis bukti. Dengan mengidentifikasi tantangan serta menyusun rekomendasi berbasis data, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan publik dalam rangka mempercepat penurunan prevalensi *stunting* secara berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Dalam pengelolaan keuangan publik, pelacakan anggaran (*budget tracking*) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa tahapan penggunaan dana berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi krusial terutama dalam konteks program pembangunan sosial yang bersifat lintas sektor, seperti intervensi penurunan *stunting*. Merujuk pada Vargas (2022), proses pelacakan anggaran mencakup pemantauan secara sistematis terhadap perencanaan, penyaluran, dan realisasi belanja, serta berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keterpaduan antara input fiskal dan capaian kebijakan.

Pelacakan anggaran bukan sekadar sarana administratif. Fungsi utamanya terletak pada peran strategisnya sebagai alat bantu dalam menilai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana publik. Dengan mengamati alur belanja secara terperinci, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan hasil program, mengevaluasi keberhasilan intervensi, serta menetapkan prioritas pembiayaan (Vargas, 2022). Hal ini menjadikan pelacakan anggaran sebagai fondasi penting dalam upaya menciptakan tata kelola fiskal yang transparan dan akuntabel (Savdoff dan Joselow, 2010).

Pendekatan penganggaran yang digunakan turut memengaruhi efektivitas pelacakan anggaran. Model seperti *incremental budgeting*, yang mengandalkan data historis sebagai dasar penetapan anggaran baru, sering diterapkan pada institusi pemerintah (Beredugo, 2019; Piosik, 2024). Di sisi lain, *activity-based budgeting* menitikberatkan pada penghitungan berdasarkan aktivitas atau *output* yang direncanakan, sehingga lebih cocok untuk program-program berbasis kinerja (Abd, 2023; Priyatmo dan Akbar, 2019)). Adapun *zero-based budgeting* adalah proses penganggaran yang mengalokasikan dana berdasarkan efisiensi dan kebutuhan program, bukan berdasarkan riwayat anggaran (Beredugo, 2019; Piosik, 2024).

Di Indonesia, tantangan pelaksanaan pelacakan anggaran dalam program gizi dan kesehatan masih cukup kompleks dengan adanya fragmentasi aliran dana dari berbagai jenjang pemerintahan (Havez, 2022; Herawati dan Sunjaya, 2022). Kurangnya konsistensi nomenklatur program juga menjadi hambatan dalam menilai total belanja yang diarahkan untuk intervensi gizi (Purnomo, *et. al.*, 2022). Ketidakterpaduan ini diperburuk oleh terbatasnya kapasitas teknis dalam melakukan *budget tagging* yang akurat, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor.

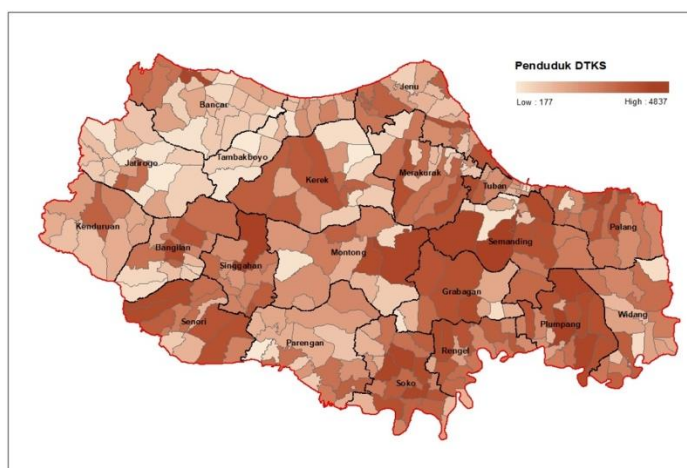
Lebih lanjut, pendekatan penganggaran di Indonesia masih dominan berbasis sektoral, sehingga menyulitkan implementasi model penganggaran berbasis kinerja baik (*good performance budgeting*), yang justru sangat diperlukan untuk program-program kompleks yang menuntut sinergi antarlembaga (Purnomo, *et.al.*, 2022). Tantangan lainnya juga mencakup kesenjangan dalam distribusi kapasitas sumber daya manusia, terutama di daerah dengan infrastruktur layanan publik yang terbatas (Herawati dan Sunjaya, 2022). Dalam situasi semacam ini, pelacakan anggaran dapat menjadi alat untuk memetakan ketimpangan, mengidentifikasi titik lemah implementasi, serta memperkuat argumentasi dalam advokasi kebijakan.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, pelacakan anggaran yang dilakukan secara konsisten dan sistematis sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja program, serta mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti yang lebih efektif (Purnomo, *et.al.*, 2022). Dalam konteks percepatan penurunan *stunting*, hal ini menjadi sangat penting agar sumber daya yang tersedia benar-benar digunakan untuk menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran anggaran (*budget tracking*) untuk mengkaji sejauh mana alokasi anggaran dimanfaatkan dalam program percepatan penurunan *stunting*. Analisis dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) analisis kesenjangan anggaran yang membandingkan antara alokasi dan realisasi belanja guna mengidentifikasi potensi deviasi dalam implementasi fiskal; (2) analisis kontribusi sektoral untuk mengukur sejauh mana masing-masing sektor, seperti kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pendidikan, serta lingkungan, berkontribusi terhadap intervensi penurunan prevalensi *stunting*; serta (3) analisis tematik yang dikembangkan berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussions*). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan pelaksanaan FGD. Studi dokumen mencakup

Secara geografis Kabupaten Tuban merupakan kota pesisir yang berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara. Meskipun merupakan kota pesisir, mayoritas pekerjaan dari Masyarakat Kabupaten Tuban adalah Petani. Hal tersebut membuat tuban menjadi produsen jagung terbesar di Jawa Timur, sementara untuk beras, Tuban merupakan penghasil terbesar urutan ke-5 di Jawa Timur. Selaras dengan itu, pemerintah tuban juga memiliki fokus dalam penurunan prevalensi *stunting* yakni melalui peningkatan akses layanan air bersih dan sanitasi serta akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan.



wilayah tengah dan selatan. Ketimpangan ini mencerminkan kerentanan sosial-ekonomi yang berpotensi berkorelasi kuat dengan prevalensi *stunting*, mengingat kondisi kemiskinan merupakan salah satu faktor terhadap keterbatasan akses pangan bergizi, layanan kesehatan, serta sanitasi layak.

B. Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Tuban

Secara umum, upaya penurunan *stunting* dilakukan dengan dua pendekatan yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung. Khususnya, ditujukan untuk kegiatan-kegiatan pada masa 1000 HPK yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab terjadinya *stunting* dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan (Gafid, *et.al.*, 2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga mendefinisikan intervensi sensitif sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*. Penyebab tersebut antara lain yaitu air, sanitasi dan kebersihan, perlindungan anak, pendidikan, perkembangan anak usia dini, kesehatan mental ibu, pertanian dan ketahanan pangan, layanan kesehatan dan keluarga berencana, jaring pengaman sosial, dan pemberdayaan perempuan (Ruel dan Alderman, 2013 dalam Khalid, 2019).

Dalam upaya penanggulangan masalah gizi, pendekatan intervensi sensitif berkontribusi sekitar 70% terhadap keberhasilan penurunan *stunting*, sementara intervensi spesifik memberikan kontribusi sebesar 30% (Khasanah, 2022; The Lancet, 2013). Namun demikian, keberhasilan kedua intervensi tersebut sangat bergantung pada adanya faktor pendukung, seperti komitmen politik yang kuat, kebijakan lintas sektor yang sinergis, serta kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan program secara efektif. Kombinasi antara intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan sistemik menjadi landasan penting dalam merancang strategi percepatan penurunan *stunting*. Sebagai bentuk konkret dari komitmen di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengadopsi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 melalui penerbitan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Kebijakan ini menjadi pijakan penting dalam mengarahkan pelaksanaan intervensi di daerah secara lebih terkoordinasi dan berbasis bukti. Peraturan tersebut mengatur pendanaan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2021-2022 Per OPD

Analisis pelacakan anggaran terhadap program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Tuban menunjukkan peningkatan substansial, baik dari sisi total alokasi anggaran maupun jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat. Pada tahun 2021, total alokasi anggaran yang tercatat adalah sebesar Rp17.548.421.000, tersebar pada empat OPD. Jumlah tersebut meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi

Rp51.121.903.656, dengan melibatkan sembilan OPD. Kenaikan ini mencerminkan pergeseran pendekatan pemerintah daerah dari kebijakan sektoral menuju pendekatan konvergensi lintas sektor, sejalan dengan arahan strategis dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang menekankan pentingnya integrasi program antar sektor untuk mengatasi masalah gizi kronis secara menyeluruh.



Gambar 2. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2021-2022 Per OPD

Secara konsisten, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi OPD dengan alokasi anggaran terbesar selama dua tahun berturut-turut, yaitu sekitar Rp14,97 miliar pada tahun 2021 dan meningkat menjadi sekitar Rp17,62 miliar pada 2022. Alokasi ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah terhadap intervensi gizi spesifik, seperti layanan kesehatan ibu dan anak, suplementasi gizi mikro, dan pemantauan tumbuh kembang balita. Di sisi lain, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatatkan lonjakan anggaran yang cukup signifikan, dari sekitar Rp2,08 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp11,23 miliar pada 2022. Perkembangan ini mengindikasikan semakin kuatnya komitmen terhadap intervensi sensitif melalui penguatan jaring pengaman sosial dan pemberdayaan keluarga sebagai bagian dari strategi pencegahan *stunting*.

Keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun dalam nominal yang lebih terbatas. Dinas Ketahanan Pangan, misalnya, mengalami peningkatan dari sekitar Rp255 juta menjadi Rp416 juta, sedangkan Dinas Pendidikan meningkat dari sekitar Rp76 juta menjadi Rp238 juta. Penambahan alokasi ini menggarisbawahi pentingnya penguatan intervensi berbasis sektor pangan dan edukasi sebagai bagian dari pendekatan multisektor. Pada tahun 2022, beberapa OPD baru mulai berkontribusi dalam skema pendanaan *stunting*,

termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mengelola anggaran sekitar Rp12,63 miliar untuk mendukung infrastruktur sanitasi dan air bersih, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan alokasi sekitar Rp8,97 miliar.

Meskipun terjadi perluasan partisipasi lintas sektor, terdapat disparitas yang cukup tajam antar-OPD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Komunikasi dan Informatika, misalnya, hanya memperoleh alokasi sekitar Rp86 juta dan Rp50 juta secara berurutan. Walaupun relatif kecil, peran mereka tetap penting dalam penyediaan data kependudukan yang akurat serta diseminasi informasi strategis kepada masyarakat. Fakta ini menggarisbawahi pentingnya keterpaduan fungsi antar sektor meskipun kontribusi fiskalnya tidak seragam. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah OPD dan akumulasi anggaran yang cukup tajam dalam dua tahun terakhir menjadi indikator positif dari penguatan implementasi kebijakan konvergensi *stunting*. Namun demikian, efektivitas program tetap sangat bergantung pada kapasitas koordinasi lintas sektor, akurasi penandaan anggaran, serta keberlanjutan evaluasi kinerja belanja publik dalam mendukung hasil yang terukur.

D. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2021-2022 Berdasarkan Urusan

Alokasi anggaran percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Tuban antara tahun 2021 dan 2022 memperlihatkan perubahan signifikan, baik dari segi distribusi antar urusan pemerintahan maupun dari sisi pendekatan kebijakan. Pada tahun 2021, urusan kesehatan mendominasi dengan alokasi anggaran sekitar Rp14,13 miliar, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp9,55 miliar. Penurunan ini mengindikasikan transformasi kebijakan daerah menuju penguatan tanggung jawab lintas sektor, tidak hanya mengandalkan sektor kesehatan saja dalam mengatasi permasalahan gizi kronis. Sebaliknya, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mencatat peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran dari sekitar Rp844 juta pada tahun 2021 menjadi Rp8,06 miliar pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai memperluas fokus pada aspek kependudukan sebagai determinan penting dalam pengendalian faktor risiko *stunting* melalui pengaturan jarak kelahiran, edukasi reproduksi sehat, serta pendampingan keluarga.

Urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa mengalami lonjakan anggaran dari yang sebelumnya belum teridentifikasi secara eksplisit pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp9,62 miliar dan Rp1,61 miliar pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pentingnya pendekatan berbasis komunitas dan penguatan aspek sosial dalam kerangka intervensi sensitif penanganan *stunting*. Perubahan signifikan juga tampak pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yang pada tahun sebelumnya belum teralokasikan secara khusus, namun pada tahun 2022 memperoleh alokasi sekitar Rp12,63 miliar. Hal ini menegaskan pemahaman baru tentang pentingnya perbaikan infrastruktur dasar, seperti sanitasi dan akses air bersih, sebagai kunci lingkungan pendukung tumbuh kembang optimal pada anak. Di sisi lain, munculnya urusan lingkungan hidup dengan alokasi sekitar Rp8,97 miliar pada tahun 2022 semakin memperkuat komitmen multisektor dalam menciptakan lingkungan sehat, yang sebelumnya belum teridentifikasi secara eksplisit dalam alokasi anggaran tahun 2021.



Gambar 3. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2021-2022 berdasarkan Urusan

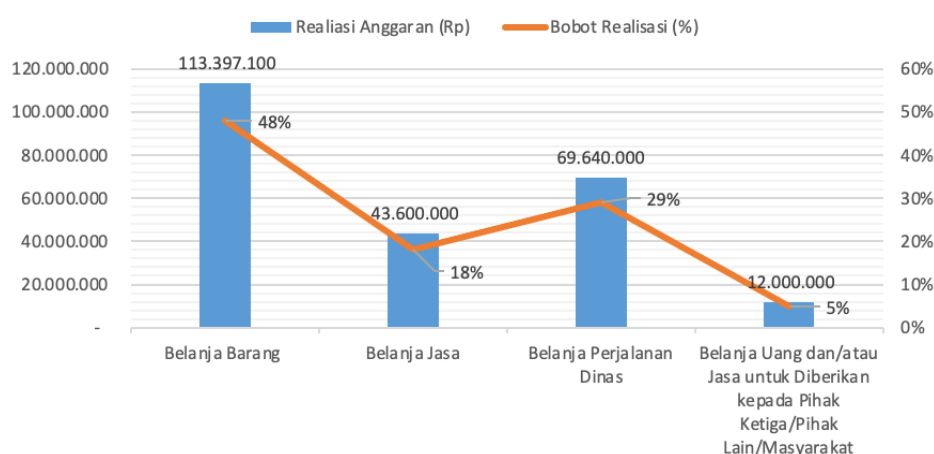
Alokasi untuk urusan pendidikan meningkat dari sekitar Rp76,30 juta menjadi Rp238,64 juta yang memperlihatkan konsistensi dan perluasan perhatian pemerintah terhadap peran pendidikan dalam strategi penurunan *stunting*. Selain itu, hadirnya urusan baru seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (sekitar Rp86,89 juta) serta komunikasi, informatika, dan statistik (sekitar Rp50 juta), meskipun nominalnya relatif kecil, namun menegaskan pentingnya aspek administratif dalam menjamin keakuratan data sasaran serta efektivitas edukasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat luas. Dari perspektif kebijakan publik, tren perubahan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan nominal alokasi anggaran, tetapi juga menunjukkan pemahaman yang lebih holistik terhadap isu *stunting* sebagai persoalan pembangunan multidimensional.

Hal yang menarik ditemukan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang pada tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp2,09 menjadi tidak lagi teridentifikasi secara eksplisit pada tahun 2022. Penurunan juga terjadi pada urusan perikanan dan pangan yang turun dari sekitar Rp200 juta dan Rp216,12 juta pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp195,30 juta dan 60 juta pada tahun 2022.

E. Realisasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Tuban Tahun 2022

Secara konseptual, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu pilar strategis dalam penanggulangan *stunting* yang berbasis siklus kehidupan. Intervensi pada tahap ini memiliki potensi jangka panjang dalam membentuk perilaku sehat, meningkatkan literasi gizi, serta memperkuat peran keluarga dalam praktik pengasuhan yang tepat.

Realisasi anggaran urusan pendidikan, khususnya dalam lingkup pembinaan kelembagaan dan manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2022, terbagi ke dalam empat kategori belanja utama, yakni belanja barang, jasa, perjalanan dinas, serta transfer belanja uang dan/atau jasa kepada pihak ketiga atau masyarakat. Di antara keempat kategori tersebut, belanja barang mencatatkan realisasi tertinggi, yaitu sekitar Rp113,4 juta atau setara dengan 48% dari total alokasi anggaran keseluruhan, yang mengindikasikan adanya fokus terhadap pemenuhan kebutuhan barang sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan PAUD. Kontribusi belanja barang ini mencerminkan pendekatan intervensi sensitif dalam percepatan penurunan *stunting* melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengasuhan pada usia dini.



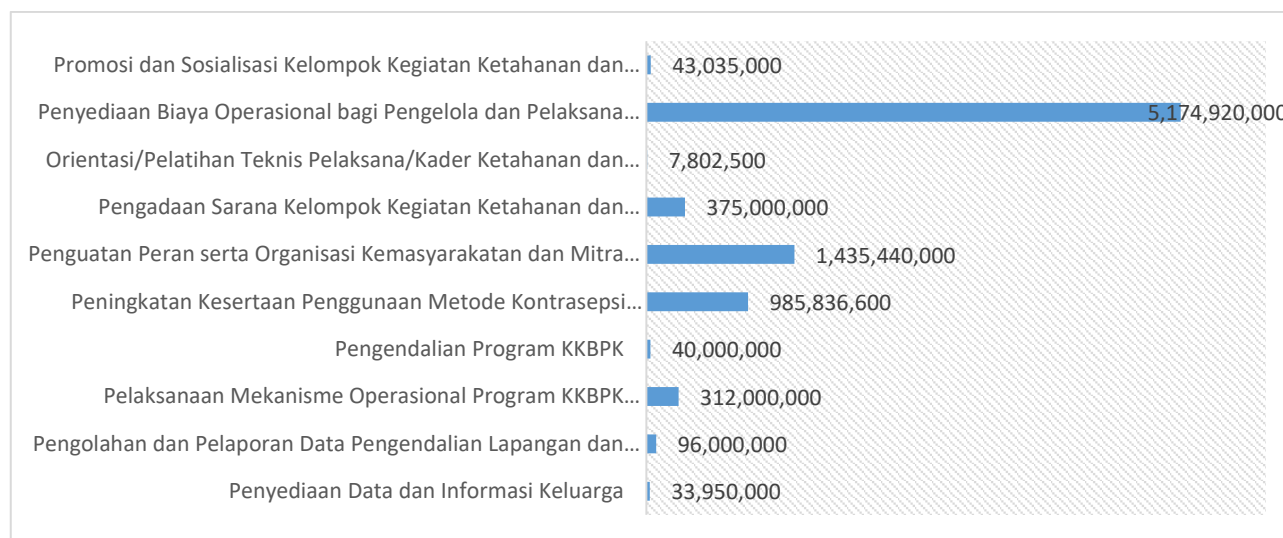
Gambar 4. Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD) Kabupaten Tuban Tahun 2022

Sebaliknya, realisasi pada kategori belanja lainnya menunjukkan capaian yang relatif rendah. Belanja jasa tercatat hanya sekitar Rp43,60 juta atau setara dengan 18% dari total alokasi anggaran keseluruhan, sedangkan belanja perjalanan dinas mencapai sekitar Rp69,64 juta atau setara dengan 29% dari total alokasi anggaran keseluruhan. Kategori dengan capaian terendah adalah belanja uang dan/atau jasa untuk pihak ketiga atau masyarakat, yang hanya Rp12 juta atau setara dengan 5% dari total alokasi anggaran keseluruhan.

Selanjutnya, realisasi total belanja operasi urusan kesehatan untuk percepatan penurunan *stunting* tahun 2022 menunjukkan pola distribusi anggaran yang terkonsentrasi kuat pada sub-kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dengan realisasi sekitar Rp5,49 miliar. Alokasi signifikan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah menempatkan intervensi gizi spesifik sebagai prioritas strategi penurunan *stunting*, melalui kegiatan seperti suplementasi gizi mikro, edukasi, pemantauan pertumbuhan balita, serta pelayanan gizi di fasilitas kesehatan. Kegiatan lain seperti penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menyerap sekitar Rp2,09 miliar. Hal ini mengindikasikan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya pendekatan promotif dan preventif yang mampu menciptakan perubahan perilaku di masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB), realisasi belanja operasi menunjukkan bahwa alokasi tertinggi berada pada sub-kegiatan penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana

atau kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan nominal realisasi mencapai sekitar Rp5,17 miliar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memberikan prioritas tinggi terhadap aspek operasional di lapangan, khususnya pemberdayaan kader dan pengelola yang berperan strategis dalam sosialisasi serta edukasi terkait keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga sebagai basis intervensi sensitif dalam penanggulangan *stunting*. Sebaliknya, kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan advokasi publik, seperti promosi dan sosialisasi, memiliki anggaran relatif rendah sekitar Rp43 juta, menandakan adanya potensi tantangan dalam menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas atau kurang optimalnya pendekatan promosi secara masif.



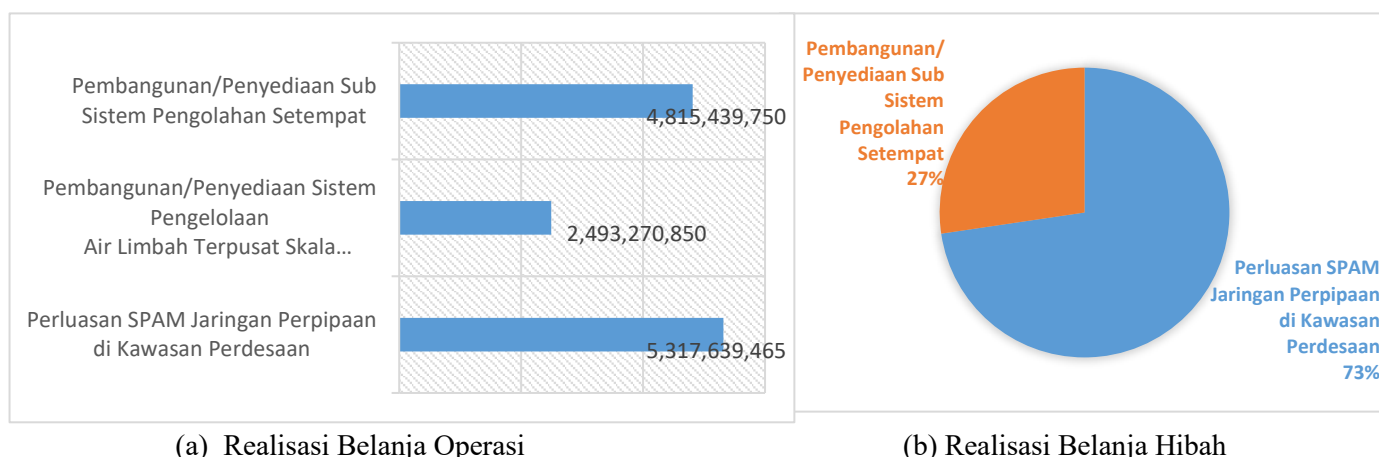
Gambar 5. Realisasi Belanja Operasi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tuban Tahun 2022

Selain itu, penguatan peran organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja dalam pelayanan KB juga mendapatkan perhatian penting dengan realisasi anggaran sekitar Rp1,44 miliar. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah mulai menyadari pentingnya kolaborasi dengan organisasi lokal dalam upaya edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga sebagai langkah preventif menurunkan angka prevalensi *stunting*. Realisasi anggaran ini mengindikasikan adanya pengakuan bahwa intervensi KB tidak hanya bersifat medis-teknis, melainkan juga memerlukan penguatan aspek sosial dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait.

Sementara itu, realisasi anggaran pada kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan layanan kontrasepsi jangka panjang, seperti peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tercatat sekitar Rp985,84 juta. Walaupun jumlah tersebut tidak setinggi biaya operasional kader, namun alokasi ini cukup signifikan dalam konteks memperluas cakupan kontrasepsi guna mendukung pengendalian laju kelahiran. Di sisi lain, beberapa sub-kegiatan seperti penyediaan data dan informasi keluarga hanya memperoleh anggaran yang sangat kecil, sekitar Rp33,95 juta. Rendahnya realisasi anggaran tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam akurasi data sasaran dan efektivitas perencanaan intervensi ke depan.

Pola realisasi anggaran dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban cenderung memprioritaskan aspek operasional di lapangan serta kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan sebagai pendekatan utama dalam mengimplementasikan intervensi sensitif penanganan *stunting*.

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2022 mempunyai realisasi belanja operasi yang cenderung memprioritaskan intervensi sensitif dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, khususnya melalui pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Belanja operasi perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan mempunyai porsi realisasi anggaran tertinggi dengan total realisasi sekitar Rp5,32 miliar. Realisasi anggaran berikutnya diikuti oleh pembangunan/penyediaan sub-sistem pengolahan setempat (sekitar Rp4,82 miliar) dan penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman (sekitar Rp2,49 miliar). Pola ini mencerminkan kesadaran pemerintah daerah bahwa penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi merupakan aspek penting yang dapat menciptakan lingkungan sehat dan secara tidak langsung mendukung penurunan angka *stunting*.

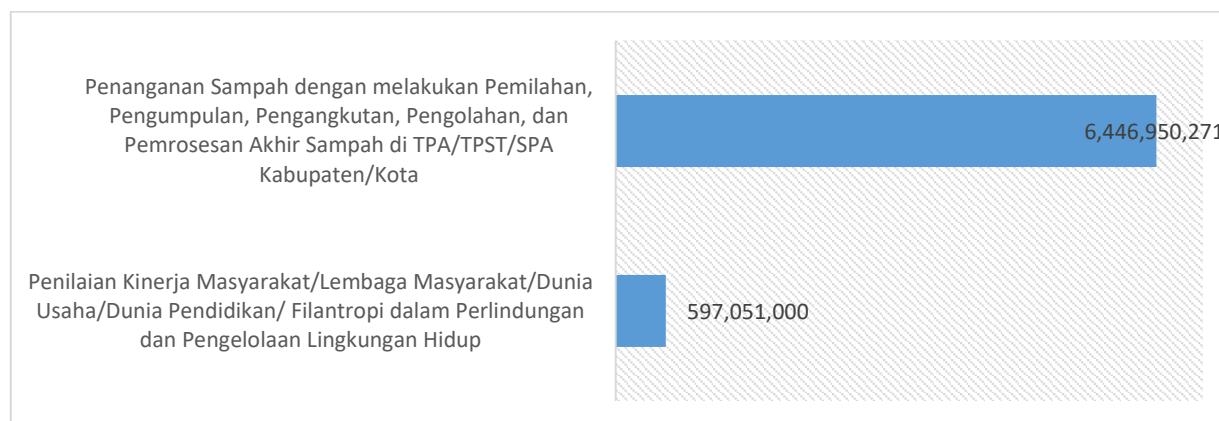


Gambar 6. Realisasi Belanja Operasi dan Hibah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2022

Belanja hibah menunjukkan realisasi yang signifikan, mencapai total sekitar Rp7,32 miliar. Hibah tersebut disalurkan kepada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, baik berbadan hukum maupun lembaga nirlaba sukarela. Alokasi terbesar, sekitar 73% atau sekitar Rp5,32 miliar, digunakan untuk mendukung perluasan SPAM melalui jaringan perpipaan di kawasan perdesaan. Sementara itu, sebesar 27% atau sekitar Rp2 miliar dialokasikan untuk pembangunan sub-sistem pengolahan limbah domestik setempat. Mekanisme hibah ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban mengadopsi pendekatan partisipatif dengan melibatkan secara aktif kelompok masyarakat dan lembaga lokal dalam pelaksanaan intervensi sensitif. Strategi ini dinilai efektif karena dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap fasilitas yang dibangun untuk mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan.

Adapun realisasi belanja operasi dalam urusan lingkungan hidup untuk penurunan *stunting* menunjukkan kecenderungan dominasi pendekatan teknis. Terdapat penekanan yang kuat pada aspek teknis pengelolaan

sampah dalam realisasi anggaran urusan lingkungan hidup pada tahun 2022. Sekitar Rp6,45 miliar dari total anggaran digunakan untuk penanganan teknis sampah, seperti pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan akhir di TPA/TPST/SPA. Di sisi lain, hanya sekitar Rp597 juta (8,5%) yang digunakan untuk kegiatan penilaian kinerja masyarakat dan lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketimpangan proporsi ini menandai strategi anggaran yang berpihak pada aspek teknis dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting*, bukan pada penguatan aspek sosial dan perilaku masyarakat yang berkontribusi terhadap efektivitas jangka panjang dalam menciptakan lingkungan sehat.



Gambar 7. Realisasi Belanja Operasi Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2022

Minimnya belanja operasi untuk kegiatan penilaian dan pelibatan masyarakat menunjukkan bahwa strategi lingkungan belum sepenuhnya menyentuh dimensi keberlanjutan berbasis perubahan perilaku. Padahal, efektivitas jangka panjang dari infrastruktur pengelolaan sampah juga dipengaruhi oleh kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Penguatan partisipasi masyarakat, edukasi perilaku hidup bersih, dan pemantauan berbasis komunitas perlu menjadi bagian integral dari strategi belanja operasi. Keseimbangan antara pembangunan fisik, aspek teknis, dan intervensi sosial berkontribusi terhadap sejauh mana anggaran publik mampu menciptakan perubahan dalam menurunkan prevalensi *stunting* di tingkat akar rumput.

Untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* secara komprehensif, perlu dilakukan recalibrasi kebijakan fiskal agar lebih seimbang antara aspek teknis dan sosial partisipatif. Investasi dalam penguatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan non-pemerintah perlu dipertimbangkan sebagai strategi jangka panjang dalam pembangunan lingkungan yang resilien. Optimalisasi belanja pada dimensi kolaboratif ini juga selaras dengan semangat konvergensi multisektor yang diamanatkan dalam regulasi nasional terkait percepatan penurunan *stunting*.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Tuban telah menunjukkan kemajuan signifikan dari sisi alokasi anggaran dan keterlibatan lintas sektor. Alokasi anggaran meningkat drastis dari sekitar Rp17,5 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp51,1 miliar pada tahun 2022 yang

mencerminkan kenaikan sebesar 192%. Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam program *stunting* juga bertambah dari 4 OPD pada tahun 2021 menjadi 9 OPD pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan sektoral menuju pendekatan konvergensi, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021.

Meskipun demikian, realisasi anggaran masih menunjukkan ketimpangan antarsektor. Dinas Kesehatan menyerap anggaran terbesar dengan realisasi sekitar Rp17,6 miliar atau 34,5% dari total anggaran 2022. Di sisi lain, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menunjukkan kontribusi penting dalam intervensi sensitif melalui pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi khususnya di perdesaan menyerap anggaran sekitar Rp5,3 miliar. Sementara itu, sektor pendidikan yang secara strategis berperan dalam aspek promotif hanya menyerap sekitar Rp239 juta atau kurang dari 0,5% dari total anggaran *stunting* pada tahun 2022, meskipun mengalami peningkatan lebih dari 200% dibanding tahun sebelumnya. Adapun penggunaan anggaran urusan lingkungan hidup dalam percepatan penurunan *stunting* menunjukkan fokus kuat pada pengelolaan sampah sebagai intervensi sensitif berbasis infrastruktur. Namun, efektivitasnya akan lebih optimal jika diimbangi dengan penguatan partisipasi masyarakat melalui peningkatan alokasi untuk kegiatan edukatif dan sosial berbasis komunitas.

Dengan temuan ini, kendala utama bukan hanya terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada kualitas alokasi dan efektivitas pelaksanaan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pelacakan dan penandaan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pendekatan berbasis hasil (*result-based budgeting*) menjadi kunci untuk memastikan bahwa peningkatan fiskal benar-benar berdampak pada penurunan prevalensi *stunting* secara terukur dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abd, N. (2023). *The role of the activity-based budgeting approach in preparing planning budgets and costs control: An applied study in SDI Company*. *American Journal of Economics and Business Management*, 6(9), 48–60. <https://doi.org/10.31150/ajebm.v6i9.2429>
- Afiyanti, Y. (2008). *Focus group discussion (diskusi kelompok terfokus) sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62.
- Astuti, S. J. W., Dwiningwarni, S. S., & Atmojo, S. (2025). *Modeling environmental interactions and collaborative interventions for childhood stunting: A case from Indonesia*. *Dialogues in Health*, 6, 100206. <https://doi.org/10.1016/j.dialog.2025.100206>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Berita resmi statistik: Profil kemiskinan Kabupaten Tuban Maret 2022*.
- Beredugo, S. B., Azubike, J. U., & Okon, E. E. (2019). *Comparative analysis of zero-based budgeting and incremental budgeting techniques of government performance in Nigeria*. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 3(6), 238–243.

- Cameron, L., Chase, C., Haque, S., Joseph, G., Pinto, R., & Wang, Q. (2021). *Childhood stunting and cognitive effects of water and sanitation in Indonesia*. *Economics & Human Biology*, 40, 100944. <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2020.100944>
- Fracassi, P., Picanyol, C., Knechtel, W., D'Alimonte, M., Gary, A., Pomeroy-Stevens, A., & Watts, R. (2020). *Budget analysis for nutrition: A guidance note for countries*. SUN Movement Secretariat.
- Hafez, R. (2020). *Spending better to reduce stunting in Indonesia: A public expenditure review*. World Bank Group. <https://coilink.org/20.500.12592/hj1pgw>
- Hafid, F., Taqwin, T., Linda, L., Nasrul, N., Ramadhan, K., & Bohari, B. (2021). *Specific interventions to prevent stunting in children under 2 years after the natural disaster*. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(E), 64–69.
- Handayani, F., & Nur, M. (2019). *Implementasi good governance di Indonesia*. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 1(1), 1–11.
- Herawati, D. M. D., & Sunjaya, D. K. (2022). *Implementation outcomes of national convergence action policy to accelerate stunting prevention and reduction at the local level in Indonesia: A qualitative study*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20), 13591.
- Hijrawati, Usman, A. N., Syarif, S., Hadju, V., As'ad, S., & Baso, Y. S. (2021). *Use of technology for monitoring the development of nutritional status 1000 HPK in stunting prevention in Indonesia*. *Gaceta Sanitaria*, 35(Suppl 2), S231–S234. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.028>
- Khalid, H., Gill, S., & Fox, A. M. (2019). *Global aid for nutrition-specific and nutrition-sensitive interventions and proportion of stunted children across low-and middle-income countries: Does aid matter?* *Health Policy and Planning*, 34(Suppl_2), ii18–ii27.
- Khasanah, U., Laili, A. N., & Saadah, N. (2022). *The effect of sensitive interventions on stunting reduction efforts*. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 10(3).
- Nisa, L. (2018). *Kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 173–179.
- Nurjazuli, Budiyo, M., Raharjo, M., & Wahyuningsih, N. E. (2023). *Environmental factors related to children diagnosed with stunting 3 years ago in Salatiga City, Central Java, Indonesia*. *Toxicologie Analytique et Clinique*, 35(3), 198–205. <https://doi.org/10.1016/j.toxac.2023.01.003>
- Piosik, A. (2024). *The impact of digitalization tools on the adoption of incremental budgeting and zero-based budgeting: Effects on satisfaction, methodology efficiency, and financial benefits*. *Procedia Computer Science*, 246, 2841–2853.
- Priyatmo, T., & Akbar, R. (2019). *Analysis of the prospect of implementing activity-based costing (ABC) in governmental organisations: A study at the State Treasury Office Jakarta IV*. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.18196/jai.2001105>
- Purnomo, H., Qureshy, L. F., Subandoro, A. W., Okamura, Y., & Sullivan, P. W. T. (2022). *Strengthening public financial management systems for better nutrition results: Budget tagging, tracking and evaluation in Indonesia*.
- Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM). (2022). *Analisis angka kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2022*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

- Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Keluarga bebas stunting*. Kementerian Kesehatan RI.
- Reinhardt, K., & Fanzo, J. (2014). Addressing chronic malnutrition through multi-sectoral, sustainable approaches: A review of causes and consequences. *Frontiers in Nutrition*, 1, 120–121. <https://doi.org/10.1159/000441823>
- Ruel, M. T., & Alderman, H. (2013). *Nutrition-sensitive interventions and programmes: How can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition?* *The Lancet*, 382(9891), 536–551.
- Savedoff, W., & Joselow, E. (2010). *Budget transparency, civil society, and public expenditure tracking surveys*. In *Anticorruption in the health sector: Strategies for transparency and accountability* (pp. 123–136).
- Scaling-Up Nutrition. (2023, August 3). *Indonesia – 2022 SUN country profile*. Scaling-Up Nutrition. <https://scalingupnutrition.org/resource-library/country-profiles/indonesia-2022-sun-country-profile>
- Sutarto, Mayasari, D., & Indriyani, R. (2018). *Stunting, faktor risiko dan pencegahannya*. *Jurnal Agromedicine*, 5(2), 540–545.
- UNICEF. (2024). *Budget brief: Enhancing public finance for better nutrition services for children in Indonesia*. <https://www.unicef.org/indonesia/media/23876/file/budget-brief-nutrition.pdf>
- Vargas, J. A. G. (2022). *Budget trackers as information sources for district budget formulation in Bogota, Colombia: Enhancing accountability and decision-making*.